

Kolonialisme, Genosida, dan Pembentukan Negara Demokrasi Baru.

Franky P. Roring
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

frankypst77@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji sisi kelam dari Demokrasi. Sisi kelam demokrasi berkaitan dengan praktek kolonialisme dan genosida dalam pembentukan negara demokrasi. Kolonialisme dan genosida terjadi saat negara-negara Barat atas nama demokrasi justru menghancurkan peradaban lama. Hal ini menjadi sisi negatif dari demokrasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Sisi Kelam, Genosida, Kolonialisme

Pendahuluan

Demokrasi menjadi sistem pemerintahan terbaik sebab itu memberikan peluang bagi rakyat untuk menjadi penguasa politik. Rakyat dapat memegang kekuasaan politik sebab demokrasi secara filosofis membangun tiga kaidah utama. Pertama, demokrasi memecah kekuasaan dari satu organ kekuasaan menjadi banyak organ kekuasaan baik secara horizontal melalui pelembagaan trias politica maupun secara vertikal melalui pembagian kekuasaan eksekutif oleh kementerian-kementerian, lembaga-lembaga non-kementerian, dan pemerintahan daerah. Kedua, demokrasi mengakui kedaulatan politik individu untuk membatasi kekuasaan negara dan untuk meningkatkan partisipasi politik dalam pemerintahan, sehingga individu bisa meningkatkan eksistensi kemanusiaan yang baik (Lipson 1968). Ketiga, demokrasi memberikan peluang bagi individu-individu untuk saling bersaing memasuki sistem perpolitikan negara dengan mekanisme pemilihan umum, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih serangkaian kebijakan alternatif secara damai yang akhirnya mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab (Lively 1974).

Demokrasi sebagai hasil pemikiran manusia tentu tidak bersifat sempurna, maka demokrasi memiliki tiga kelemahan fundamental. Pertama, demokrasi memang memberikan peluang bagi rakyat untuk memerintah negara, namun demokrasi memiliki keterbatasan sistem. Sistem yang terbatas menyebabkan hanya sebagian kecil individu yang memiliki kesempatan untuk memerintah negara dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan

dan pengetahuan politik individu. Kedua, demokrasi menjadi sistem eksklusif pada saat demokrasi hanya menjadi sistem yang mengutamakan kepentingan sedikit elit politik (Birch 2001). Para elit politik yang memasuki pemerintahan walaupun merupakan hasil pemilihan, namun elit cenderung hanya mengutamakan antarsesama elit. Elit kemudian menguasai sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang pada akhirnya memunculkan ketidaksetaraan (Green) bagi mayoritas. Terakhir, demokrasi sebagai sistem yang berasal dari peradaban barat secara historis memiliki sejarah kelam sebab demokrasi itu berkembang ke berbagai wilayah dunia melalui mekanisme penjajahan, dan sebagian itu ada yang terjadi secara damai, namun tidak sedikit yang terjadi melalui praktek pemaksaan atau penindasan atau pembumihangusan wilayah dan pembantaian penduduk asli.

Poin ketiga menjadi inti bahasan dalam jurnal ini. Jurnal ini akan membahas mengenai penjajahan dan genosida sebagai sisi kelam demokrasi. Jurnal ini menjadikan tulisan Michael Mann berjudul bab 4 yang berjudul *Genocidal Democracies in the New World* yang merupakan bab keempat dari buku *The Darkside of Democracy Explaining Ethnic Cleansing* terbitan New York: Cambridge University Press tahun 2005. Selain itu, riset juga akan menggunakan sumber-sumber literatur alternatif untuk memperdalam analisa kontemporer terkait sisi gelap demokrasi yang terjadi di berbagai negara di dunia.

Praktek Genosidal Terhadap Negara Jajahan.

Negara-negara demokrasi selalu menekankan kualitas sistem pemerintahan sebagai yang terbaik sebab semua negara tersebut memang memberikan peluang bagi rakyat untuk menjadi penguasa politik. Hanya saja, klaim-klaim kesempurnaan sistem politik tersebut memiliki sisi kelam sebab ada dua hal yang dapat terjadi. Pertama, sebagian negara-negara demokrasi melakukan praktek kolonisasi terhadap negara lain di dunia. Kedua, sebagian negara demokrasi baru di dunia merupakan hasil genosida atau pembersihan penduduk asli oleh negara kolonial. Fenomena genosida yang menghancurkan negara dan rakyat yang lama kemudian memunculkan negara baru, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Negara demokrasi terbentuk dari bekas wilayah genosida yang secara ironis kemudian mempertahankan praktek genosida terhadap penduduk asli sesuai dengan keputusan politik yang sah secara demokrasi.

Mann melihat proses kolonisasi selalu terjadi secara bertahap dengan fase pertama berawal dari kolonisasi perekonomian. Para pendatang mengawali proses kolonisasi dengan hanya bertransaksi ekonomi dengan penduduk asli yang terbatas tanpa ada rencana pendudukan pada masa awal. Negara kolonial kemudian menyadari potensi kekayaan sumber daya alam, maka negara barat secara agresif mulai melakukan serangan terhadap basis ekonomi pribumi untuk mengambil wilayah sumber ekonomi, dan negara mulai menerapkan koloni terbatas. Kebutuhan untuk menguasai sumber ekonomi mendorong negara barat untuk memperluas wilayah jajahan dan mulai memaksa penduduk bekerja paksa untuk menyediakan sumber-sumber strategis, seperti tambang, pertanian, dan sebagainya. Fase terakhir terjadi pada saat negara penjajah ingin memperbesar jumlah pendatang, maka negara penjajah meningkatkan strategi okupasi terhadap wilayah jajahan, dan negara juga mulai menerapkan pembersihan penduduk asli (Mann 2005: 71-72).

Penguasaan sumber ekonomi umumnya juga berlanjut dengan penguasaan penuh secara politik di kawasan penjajahan. Negara penjajah pada awalnya tidak menginginkan penguasaan penuh secara politik terhadap kawasan penjajahan, bahkan negara barat juga tidak menginginkan menguasai negara yang memiliki kedaulatan politik penuh, namun negara itu sebatas memperluas asas teritorial untuk menolak aturan dan hukum negara kuat seperti Turki Utsmaniah sebelum perang dunia pertama. Negara penjajah saat berhadapan dengan wilayah lemah, maka negara itu memang akan berusaha menguasai secara bertahap yang berawal dari penguasaan wilayah secara terbatas dengan memberikan peran politik yang terbatas bagi pribumi. Problematika politik kemudian menjadi muncul saat negara secara agresif mendatangkan warga migran ke wilayah tertentu, maka warga migran mulai merasakan wilayah itu sebagai tanah air. Para pendatang mengusir penduduk asli dan menguasai wilayah strategis, dan mulai para pendatang mulai menerapkan bumi hangus. Negara penjajah yang pada awalnya hanya menginginkan penguasaan pajak pribumi, kemudian negara penjajah harus memenuhi keinginan warga pendatang untuk menguasai secara penuh teritori (Mann 2005: 72-73).

Penguasaan politik diimbangi dengan kekuatan militer dan ideologi. Kekuatan militer menjadi penting sebab itu bertujuan untuk melindungi warga pendatang dan untuk melenyapkan kekuatan militer pribumi. Masa awal penjajahan umumnya jumlah pendatang masih lebih sedikit daripada pribumi, maka pertahanan militer hanya sebatas melindungi

warga pendatang. Kemudian, jumlah penduduk mulai membesar, maka militer mulai menerapkan strategi militer gerilya untuk menghancurkan basis militer inti pribumi. Pada tahap akhir, militer akan mendukung proses pendudukan total wilayah jajahan yang mengarah kepada genosida. Aksi militer yang agresif tidak terlepas dari persepsi bahwa militer harus melindungi simbol peradaban modern yang berasal dari Eropa. Para pendatang memandang bahwa peradaban mereka harus bisa bertahan di wilayah jajahan. Militer perlu mengeliminasi sumber pencemaran budaya modern yang berasal dari masyarakat "primitif" dalam pandangan warga pendatang (Mann 2005: 74-75).

Genosida di kawasan baru menjadi semakin parah seiring dengan penyebaran penyakit asli dari wilayah penjajah. Para pendatang memasuki tanah jajahan sebenarnya turut membawa berbagai penyakit khas dunia asal yang telah menginfeksi pendatang dan binatang dari tanah asal. Warga pendatang memiliki keunggulan daya tahan tubuh, sehingga para pendatang bisa bertahan dari penyakit. Persoalan muncul pada saat para pendatang kemudian menginfeksi kalangan pribumi, namun penduduk pribumi tidak memiliki daya tahan tubuh yang sama kuat dengan pendatang. Pribumi yang terkena penyakit hanya sedikit yang mampu bertahan hidup, sehingga jumlah penduduk pribumi pun menurun secara drastis yang merupakan hasil kombinasi dari tahapan genosida sebelumnya dan tahapan genosida secara biologis (Mann 2005: 75-76).

Pola-pola genosida yang sudah menjadi bahasan di atas menunjukkan sisi relevansinya dalam proses tiga negara baru, yaitu Meksiko, Australia, dan Amerika Serikat. Sebagian wilayah tersebut mengalami varian berbeda-beda, namun itu semua menunjukkan kesamaan pola genosida. Pembahasan fenomena genosida menjadi bahasan dalam bagian-bagian berikut ini.

Genosida di Balik Pembentukan Negara Meksiko.

Pada awalnya, kedatangan bangsa Spanyol melalui perusahaan dagang hanya memiliki misi sederhana, yaitu misi untuk menguasai sumber ekonomi di Kepulauan Karibia. Misi ekspedisi ekonomi tersebut memang melakukan penguasaan atas teritori yang bersamaan dengan praktek pembunuhan terhadap elit lokal, namun setiap serangan masih bersifat sporadis sebab wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Aztec. Kalangan penjajah pun mulai menerapkan strategi pembentukan aliansi politik terhadap kekuasaan-kekuasaan lokal

yang menginginkan kemerdekaan lepas dari kekuasaan Aztec. Pembentukan aliansi tidak mudah sebab sebagian sekutu mengkhianati penjajah yang kemudian berdampak praktek genosida sebagai strategi pertama kolonisasi terhadap pembangkang. Kemudian, aliansi strategis semakin membesar, maka aliansi pun mulai melakukan serangan terhadap Aztec yang berdampak kejatuhan Aztec itu sendiri dan masyarakat yang kalah memperoleh kebebasan untuk meninggalkan Aztec atau untuk bergabung dengan aliansi (Mann 2005: 76-77).

Kerajaan Spanyol kemudian memberikan izin pengelolaan tanah jajahan dengan tetap mempertimbangkan resiko-resiko yang bisa terjadi di wilayah tersebut, maka kebijakan kolonisasi tidak boleh memusnahkan masyarakat pribumi yang berdamai, namun pemerintahan kolonial harus mampu menerapkan kebijakan asimilatif yang menjadi strategi kedua kolonisasi. Kebijakan tersebut mewujud dalam berbagai tindakan, mulai dari pernikahan antara pendatang dengan pribumi, perekrutan tenaga kerja pribumi, pendekatan misionaris kristiani kepada penduduk setempat, pengenalan budaya pendatang, penguatan aliansi politik dengan penguasa-penguasa lokal, pengenalan sistem politik dan hukum Spanyol, pemindahan yang tidak loyal menuju daerah lain, hingga penempatan warga pribumi dalam posisi jabatan birokrasi. Kemudian, keturunan hasil pernikahan campuran atau *Mestizo* kemudian membentuk kelas elit dominan yang menguasai perpolitikan Meksiko. Kemunculan Meksiko menjadi contoh terbaik pendekatan "soft" dari Spanyol terhadap wilayah Karibia (Mann 2005: 77-78), dan itu terlihat berbeda dengan aneksasi wilayah Australia dan Amerika Serikat.

Genosida dan Pembentukan Negara Australia.

Bangsa Inggris saat memasuki tanah Australia telah melihat bangsa Aborigin sebagai masyarakat yang sangat primitif. Aborigin tidak memiliki struktur kekuasaan politik yang rumit sebab Aborigin tidak memiliki sistem aristokrasi, dan mereka tidak menjalankan sistem perekonomian yang kompleks, serta Aborigin juga tidak memiliki kemampuan tenaga kerja yang rumit. Negara Inggris membutuhkan tanah jajahan untuk memperkuat revolusi industri, maka negara menerapkan kebijakan pengusiran kaum Aborigin dari tanah asal dan memindahkan ke wilayah baru yang miskin sumber daya alam. Kaum Aborigin yang masih bertahan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial yang telah menciptakan

endemi kelaparan pasca hewan peternakan kaum kolonial merusak sumber pangan, dan warga pendatang merespon perlawanan dengan sangat brutal sebagai wujud kolonisasi tipe ketiga tanpa meminta persetujuan pemerintahan Inggris. Pemerintahan Inggris memang melarang praktek genosida, namun kekuasaan politik secara *de facto* berada di tangan pendatang, dan itu semakin melemah pasca pembentukan pemerintahan Australia Barat yang otonom (Mann 2005: 79-80).

Pemerintahan otonom meningkatkan respon agresif terhadap perlawanan pribumi. Pemerintah otonom menerapkan kebijakan-kebijakan keras, mulai dari peracunan makanan yang diprediksi akan dicuri oleh Aborigin, genosida terhadap perdesaan tempat asal perlawanan, pembaratan sebagian Aborigin yang diambil paksa dari komunitas asal, pemaksaan polisi dari Aborigin yang terbaratkan untuk melawan sesama Aborigin, pemaksaan misi misionaris kepada Aborigin, pemaksaan sistem politik dan hukum Australia, pelarangan pernikahan antara individu Aborigins dengan individu hasil mixed-married, pelarangan Aborigin untuk bekerja dalam perkotaan tanpa pemberian izin dari otoritas kolonial, hingga penerapan kebijakan segregasi atas dasar warna kulit sebagai strategi keempat kolonisasi. Kemudian, kekuasaan kolonial dengan persetujuan parlemen kolonial mulai memaksakan asimilasi paksa sebagai pendekatan kolonisasi kelima dengan mendorong Aborigin tunduk secara total yang menyebabkan kawasan Tasmania Selatan mengalami praktek genosida sebagai dampak fokus wilayah selatan hanya untuk pendatang. Kondisi mulai berubah pasca kemenangan Partai Buruh tahun 1972 yang mengakui hak kewarganegaraan penuh terhadap kaum Aborigin (Mann 2005: 80-83).

Kolonisasi Eropa, Genosida terhadap Indian, dan Pembentukan Amerika Serikat.

Praktek genosida oleh penjajah yang agresif dalam merespon perlawanan dari bangsa Indian. Perlawanan dari Indian pada awalnya disebabkan jumlah pendatang dari Eropa semakin banyak dan para pendatang mulai menguasai mayoritas tanah milik bangsa Indian. Bangsa pendatang kemudian mulai menjalankan praktek genosida yang pertama kali terjadi di Virginia dan New England yang memaksa Indian keluar dari kedua wilayah dan menetap di wilayah miskin. Praktek genosida semakin kompleks sebab itu juga mendorong pemaksaan ideologis terhadap pribumi dengan satu tujuan, yaitu bangsa Indian bersedia mengakui supremasi kulit putih. Praktek genosida terhadap bangsa Indian pada awalnya memiliki

perbedaan kadar sebab wilayah Indian terbagi antara Spanyol, Inggris, dan Perancis. Kebijakan asimilasi berbeda-beda yang berdampak perbedaan kondisi sosial Indian, namun itu berubah pasca pembentukan negara Amerika Serikat (Mann 2005: 84-85).

Pemerintahan Federal dengan semangat pencerahan sebagai kekuatan ideologis berusaha menciptakan masyarakat Indian yang beradab melalui kebijakan asimilasi yang menghasilkan keturunan campuran, namun mayoritas pendatang tidak menyukai hal tersebut. Kalangan pendatang secara sepihak melarang warga campuran untuk memasuki perkotaan. Warga Indian yang terusir pun merasa tertindas dan melawan balik. Perlawanan menyebabkan kekuasaan negara federal pun menerapkan kebijakan deportasi kaum Indian semakin menjauhi pusat pemerintahan Amerika Serikat. Kebijakan agresif dari pemerintahan Federal semakin menemukan momentum yang tepat pasca kejatuhan Kalifornia dari Spanyol kepada Amerika Serikat tahun 1848. Kalifornia saat berada dalam kekuasaan Spanyol masih menerapkan kebijakan yang relatif humanis kepada bangsa Indian yang terutama menerima pembaptisan, walaupun sebagian Indian memang mengalami tekanan keras dari kolonial, namun tetap memiliki kebebasan yang terbatas. Kondisi demikian berubah pasca penguasaan penuh terhadap Kalifornia oleh Pemerintah Amerika Serikat (Mann 2005: 86-87).

Negara Bagian Kalifornia yang terbentuk pasca kekalahan Spanyol menjadi contoh terbaik ironi sistem demokrasi sebab parlemen mengotorisasi praktek genosida terhadap Indian (Madley 2008). Parlemen mengizinkan pemerintah negara bagian untuk menerapkan praktek deportasi kepada bangsa Indian yang menolak untuk menempati wilayah penampungan Indian yang memang tidak memberikan kesejahteraan bagi penghuni penampungan. Negara bagian Kalifornia juga melakukan penolakan terhadap kebijakan asimilasi dari pemerintahan federal dan pemerintah Kalifornia bahkan membentuk pasukan milisia untuk membatasi ruang gerak Indian, serta pengerahan milisia untuk membumihanguskan wilayah Indian dan pemerkosaan terhadap perempuan yang menjadi asal perlawanan. Sikap keras Kalifornia terhadap Indian mendorong sebagian negara bagian, seperti Minnesota dan Colorado untuk menerapkan kebijakan yang sama. Kebijakan agresif hanya memunculkan siklus konflik berkepanjangan yang terus menimbulkan korban jiwa bagi penduduk AS menjadikan negara federal bersikap pragmatis (Mann 2005: 88-91).

Sikap pragmatis pemerintahan federal disebabkan oleh perubahan situasi geopolitik atau teritorial yang berdampak terhadap perbedaan kebijakan federal sesuai dengan tantangan yang ada. Pemerintah federal memang berusaha merangkul bangsa Indian, walaupun kebijakan keras juga menjadi pilihan sebagai respon terhadap situasi politik tertentu, misalnya dukungan Indian kepada pengiasa Inggris menyebabkan Washington memerintahkan serangan radikal kepada suku Iroques. Washington sendiri lebih menyukai metode pengenaan bunga tinggi bagi bangsa Indian untuk mendapatkan wilayah baru pasca kegagalan bangsa Indian melunasi hutang. Taktik Washington memang turut memperluas wilayah Amerika Serikat (Mann 2005: 92).

Washington juga lebih menyukai proses asimilasi, walaupun kebijakan deportasi dan genosida bisa menjadi pilihan terakhir sebab dia mempercayai gagasan kemungkinan kesetaraan ras antara Indian dan kulit putih. Presiden Jackson lebih menyukai kebijakan bumi hangus terhadap kekuatan perlawanan dari suku Cherokee, Apache, dan Sioux. Presiden Lincoln menerapkan kebijakan moderat dengan hanya memberikan perintah genosida jika situasi memang tidak memungkinkan ada solusi lain. Lincoln menyetujui hukuman mati dengan jumlah minimal kepada Indian yang menyerang dan membunuh warga kulit putih, dan memaksa sebagian pelaku lain hidup dalam penjara. Kebijakan penjara memang merugikan bangsa Indian, namun itu bisa mencegah praktek genosida secara ekstrim. Terakhir, Roosevelt yang dikenal sebagai seorang demokrat juga menunjukkan sikap pragmatis. Dia memimpin Amerika yang sudah mengalami penurunan jumlah penduduk Indian, namun dia tetap terkesan memandang perlu pemunculan sikap rasisme kepada bangsa Indian, walaupun itu tidak bermakna dia berniat melanjutkan kebijakan genosida terhadap bangsa Indian yang tersisa (Mann 2005: 93-94).

Praktek genosida oleh Amerika Serikat menjadi kekuatan yang sangat kuat sebab praktek tersebut menempatkan warga pendatang berhadapan secara langsung dengan suku Indian. Keinginan para pendatang untuk memperluas wilayah penjajahan yang menjadi kebutuhan mendesak pasca peningkatan jumlah pendatang menyebabkan keterbatasan lahan dan sumber daya alam, maka kalangan pendatang menekankan kebijakan ekspansif. Pendekatan ekspansif mendapatkan serangan balasan dari Indian, dan itu turut mengubah kebijakan ekspansif menjadi pendekatan genosida secara masif kepada suku Indian. Pendekatan genosida oleh pendatang menjadi semakin kuat seiring dengan transformasi

sebagian besar pendatang menjadi kekuatan milisia yang secara agresif menyerang Indian. Sebagian pemerintah negara bagian yang memperoleh mandat dari rakyat pendatang melalui pemilihan umum kemudian membiayai milisi dan mengombinasikan serangan militer dengan kekuatan milisia terhadap kaum pribumi. Negara bagian dengan dukungan parlemen setempat turut mendanai praktek genosida tersebut dan parlemen harus memenuhi suara mandat pemilih para wakil rakyat tersebut (Mann 2005: 95-99). Pengesahan keputusan genosida oleh parlemen memang menunjukkan sisi kelam demokrasi.

Kolonisasi dan Persepsi mengenai Dunia Baru.

Genosida tidak terlepas dari praktek Kolonialisme yang turut menghancurkan wilayah-wilayah berbeda. Sebagian wilayah sebenarnya telah memiliki kebudayaan dan kebangsaan berbeda menjadi satu kesatuan negara yang sama, sehingga itu mengalami proses homogenisasi. Kolonialisme telah membagi dunia menjadi dua kategorisasi. Pertama, kategorisasi dunia menjadi tiga zonasi, yaitu dunia pertama yang berisi Eropa Barat dan Amerika Utara, dunia kedua yang terdiri dari Amerika Latin, dan dunia ketiga yang berisi mayoritas negara Asia dan Afrika. Kedua, pembagaaan dunia menjadi dua kurun waktu peradaban, yaitu dunia lama yang terdiri dari Eropa dan sebagian Asia seperti Jepang dan China, dan dunia baru yang terdiri Amerika Serikat, Indonesia, dan sebagainya (Ommen 2009: 8-9).

Kolonisasi menurut Ommen memiliki tiga varian. Pertama, kekuasaan kolonial menarik diri dari sebuah tanah jajahan sebagai akibat kemunculan gerakan nasionalisme, dan fenomena tersebut terjadi di sebagian besar Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Kedua, kolonisasi berubah menjadi relasi yang saling berdampingan antara warga asli dengan warga pendatang, seperti di kawasan Amerika Latin. Ketiga, kolonisasi yang menenyapkan mayoritas bangsa Asli dan menggantikannya dengan bangsa pendatang, namun bangsa pendatang melakukan perlawanan terhadap negara asal untuk memisahkan diri sebagai negara baru, seperti di Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi contoh unik sebab kaum migran menggunakan kekuatan perangnya untuk menyingkirkan bangsa asli, kemudian bangsa migran melawan negara asal dan membentuk negara Amerika Serikat. Pembentukan negara Amerika Serikat sendiri menjadi dua hal ironi sebab pasca pembentukan negara tersebut,

yaitu Amerika masih mengakui keterhubungan kultural dengan negara asal, dan Amerika Serikat menerapkan prinsip keterbukaan etnisitas bangsa pendatang (Ommen 2009: 61-64).

Satu tema menarik yang diangkat oleh Ommen adalah kolonialisme internal. Kolonialisme internal dilakukan oleh bangsa dominan terhadap bangsa minoritas. Kolonialisme internal akan menjadikan satu hukum nasional yang mengabaikan dimensi pluralis. Kolonialisme internal juga bisa saja dilakukan sebagai bagian kontrol terhadap wilayah lokal dengan tujuan meminggirkan identitas bangsa asli (Ommen 2009: 64-65), seperti Cina yang masih meminggirkan Tibet, dengan Tibet yang awalnya negara mandiri dikolonisasi oleh China. Contoh lain adalah pemaksaan kaum pribumi di Meksiko, Australia, dan Amerika untuk menerima standar peradaban barat jika masyarakat pribumi masih mau bertahan hidup atau kalangan pribumi harus siap mengalami genosida. Kebijakan genosida sebenarnya juga berkaitan dengan upaya mempertahankan kemurnian ras pendatang.

Praktek genosida berakar pada konsepsi rasisme yaitu serangkaian persepsi negatif terhadap ras menyebabkan distorsi konsep ras sebagai hasil genetis menjadi sentimen ras sebagai etnisitas (Ommen 2009: 96-98). Etnisitas berkaitan erat dengan perbedaan atas dasar kultur, sementara itu ras dibedakan atas dasar faktor genetis. Etnisitas semakin kompleks pada saat itu terjadi perbedaan kultural yang tajam dan itu mengarah kepada konflik antarras, misalnya konflik antara warga Kristen berkulit putih dengan warga Indian dan Aborigin. Rasisme bisa berkembang menjadi sentimen kolektif pada saat kelompok ras dominan dalam suatu wilayah membangun sentimen negatif terhadap kelompok ras minoritas. Terakhir, penyatuan konsep ras dan etnis sering digunakan sebagai proses pengaburan bahwa sebenarnya terjadi persoalan diskriminatif dan konflik dalam negara. Genosida menjadi pendekatan radikal untuk mengatasi perbedaan kultural dan ras.

Praktek genosida berkaitan erat dengan etnifikasi, yaitu sebuah proses yang menghubungkan asas teritori dengan budaya, dan relasi tersebut bisa mempengaruhi eksistensi sebuah bangsa. Etnifikasi dalam konteks genosida memiliki tiga bentuk. Pertama, sebuah bangsa asli yang bertahan akan mengalami proses etnifikasi oleh kolonial dengan tiga varian, yaitu marginalisasi penduduk asli dalam dunia baru, labelisasi sebuah komunitas tanpa keterikatan teritorial, dan pemecahan satu simbol etnis dalam banyak wilayah oleh nenek moyang, seperti yang terjadi di Xinjiang, China yang diklaim oleh RRC sebagai bagian

dari Dinasti Qing (Clarke 2013). Kedua, pemblokiran partisipasi dan birokrasi terhadap pribumi yang menjadi warga negara baru. Ketiga, penyatuan bangsa beragam dalam satu entitas kolonial (Ommen 2009: 20-22) melalui kebijakan asimilasi yang dipaksakan oleh kekuasaan kolonial, seperti yang dialami oleh Aborigin dan Indian.

Penjajahan terhadap Indian dan Aborigin merupakan contoh ironi dari kekuasaan Inggris. Inggris menjadi kekuatan kolonial yang bersifat paradoks. Inggris merupakan negara demokrasi, namun itu juga memiliki masyarakat pendatang yang agresif terhadap penduduk asli. Masyarakat pendatang menjadi kepanjangan tangan kebijakan genosida oleh kekuasaan kolonial Inggris. Praktek genosida bahkan terus berlanjut sekalipun Inggris menarik diri dari wilayah jajahan yang terjadi saat tanah jajahan memerdekakan diri sendiri atau memperkuat kekuasaan negara otonom yang masih termasuk persemakmuran Inggris. Pendekatan genosida yang dilakukan oleh masyarakat pendatang dari Inggris sebenarnya memang menjadi bagian dari sejarah internal Inggris sebab pendirian Kerajaan Inggris yang menyatukan beberapa negara juga melalui pendekatan radikal yang mengarah kepada genosidal (Shaw 2011) dengan cara genosida fisik maupun dengan genosida kultural (van Krieken 2004) yang juga terjadi saat Kerajaan Inggris menganeksasi tanah jajahan.

Kesimpulan.

Makalah ini menyimpulkan dua poin penting. Pertama, genosida menjadi ironi bagi negara demokrasi yang berada di tanah Eropa. Negara-negara demokrasi Eropa sebenarnya mengawali sejarah dengan melawan penindasan dari kekuasaan absolut yang ada dalam negara masing-masing. Perlawanan tersebut menyebabkan kemunculan ide demokrasi yang membatasi kekuasaan negara dan meningkatkan aspek kedaulatan rakyat berbasis hak-hak individu. Negara demokrasi baru di kawasan Eropa pasca peningkatan kapitalisme memperluas pencarian wilayah-wilayah baru sebagai sumber daya alam baru. Perluasan tersebut mengarah kepada kolonisasi terhadap wilayah-wilayah baru, dan meningkatkan kapasitas pemukiman pendatang, serta memaksakan pembentukan negara baru di tanah jajahan. Pribumi yang mendiami dunia lama pun melawan, dan kekuasaan kolonial merespon hal itu dengan cara beragam, mulai dari deportasi, asimilasi paksa, hingga genosida.

Kedua, negara-negara baru kolonial tidak semua menerapkan kebijakan genosida sebab sebagian negara kolonial atas perintah otoritas negara asal melarang secara tegas

praktek genosida yang berlebihan, dan itu terlihat dengan kebijakan kolonial Spanyol di Meksiko, walaupun sebagian kawasan Karibia mengalami genosida. Kondisi berbeda terjadi di wilayah Australia pada saat pemerintahan otonom terbentuk di Australia atas persetujuan Kerajaan Inggris kemudian menerapkan genosida secara sistematis terhadap Aborigin. Kemudian, fenomena berbeda terjadi di Amerika Serikat saat terjadi perbedaan antara negara federal dengan negara bagian. Pemerintahan federal secara pragmatis menerapkan tarik ulur berkaitan hak Indian, namun pemerintah negara bagian bersama para pendatang menerapkan kebijakan genosida besar-besaran kepada Indian.

Referensi:

Clarke, Micheal. 2013. Ethnic Separatism in the People's Republic of China History, Causes and Contemporary Challenges. *European Journal of East Asian Studies*, 12: 1, 109-133.

Mann, Michael. 2005. *The Darkside of Democracy Explaining Ethnic Cleansing*. New York: Cambridge University Press (Chapter 4, Genocidal Democracies in the New World).

Madley, Benjamin. 2008. California's Yuki Indians: Defining Genocide in Native American History. *Western Historical Quarterly*, 39: 3, 303-332.

Ommen, TK. 2009. *Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas Mendamaikan Persaingan Identitas*. Bantul: Kreasi Wacana.

Shaw, Martin. 2011. Britain and genocide: historical and contemporary parameters of national responsibility. *Review of International Studies*, 37: 5, 2417-2438.

van Krieken, Robert. 2004. *Rethinking Cultural Genocide: Aboriginal Child Removal and Settler-Colonial State formation*.